

Pemangkasan Anggaran Berpengaruh ke Infrastruktur

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyebut kondisi fiskal yang tengah dialami Kaltim saat ini diperkirakan akan mempengaruhi secara signifikan arah pembangunan di daerah. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pada pos Transfer ke Daerah (TKD), membuat sejumlah proyek pembangunan di Benua Etam berada dalam posisi rawan.

Reza mengungkapkan bahwa situasi ini membuat pemerintah daerah harus menghadapi pilihan sulit. Menurut dia, ada kemungkinan beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan terpaksa ditunda pelaksanaannya, bahkan tidak menutup kemungkinan dibatalkan.

"Dengan adanya keterbatasan fiskal, pembangunan di Kaltim bisa terganggu. Beberapa proyek strategis berpotensi ditunda atau bahkan dibatalkan," ujar Reza, Minggu (31/8) kemarin.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, pengurangan anggaran bukan hanya berdampak pada pelaksanaan proyek-proyek baru, tetapi juga dapat menghambat kelanjutan pembangunan yang sudah masuk tahap perencanaan. Apabila kebijakan penghematan ini berlangsung lebih lama, ia khawatir roda pembangunan daerah akan melambat.

"Pemangkasan ini tentu akan sangat berpengaruh. Yang paling dirasakan masyarakat nantinya adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah," lanjutnya.

Reza menilai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya akses yang baik, distribusi barang dan jasa akan lebih lancar, serta membuka peluang investasi baru. Namun sebaliknya jika pembangunan ini tertunda, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk menurunnya mobilitas dan terhambatnya aktivitas ekonomi.

Komisi III DPRD Kaltim kata Reza, saat ini tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan fiskal tersebut. Dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar segera menyiapkan langkah-langkah adaptif dengan melakukan penyesuaian skala prioritas pembangunan.

"Yang terpenting, proyek-proyek yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat jangan sampai terhenti. Pemprov Kaltim harus lebih selektif dalam menentukan program mana yang tetap dijalankan meskipun dengan anggaran terbatas," tandasnya.

Lebih jauh, Reza menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi agar pembangunan Kaltim tidak terhambat. Ia juga berharap kebijakan penghematan tidak berlangsung terlalu lama, sehingga target pembangunan strategis tetap bisa diwujudkan. **(ai/ht/fy)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM , Pemangkasan Anggaran Berpengaruh ke Infrastruktur, 01/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Dalam Pasal 33 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Anggaran pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja kementerian/ lembaga;
 - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
 - c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 34 UU 38/2004, dalam mengelola anggaran pembangunan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan jalan.